

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang, hal tersebut terlihat dari salah satu karakteristik negara yang sedang berkembang yaitu negara tersebut sedang berupaya meningkatkan perekonomian agar lebih stabil. Pada upaya meningkatkan perekonomian di Indonesia maka pemerintah melakukan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, kesejahteraan tersebut dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut sebagai tolak ukur pencapaian kesejahteraan di sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dan juga masyarakatnya sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Tarigan (2005) pertumbuhan ekonomi adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi mengukur hasil dan perkembangan dari satu periode ke periode selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dilihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan dilakukan tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga dilakukan pada tingkat yang lebih kecil, yaitu daerah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Seringkali pembangunan di wilayah yang lebih kecil mampu memberikan hasil

yang mendukung pembangunan di wilayah yang lebih besar. Pada tingkat yang lebih kecil, pembangunan dilakukan di tingkat daerah setingkat provinsi maupun setingkat kabupaten atau kota (Widodo, 2006:6 dalam Indra Rukmana, 2012, hlm 27).

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara maupun wilayah regional secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan pendapatan dari berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga berlaku atau harga konstan. Sehingga perubahan dalam nilai pendapatan hanya disebabkan oleh suatu perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Lincoln (1997), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak.

Menurut W. Arthur Lewis dalam teorinya model dua sektor Lewis (*Lewis two sector model*) di negara sedang berkembang terjadi transformasi struktur perekonomian dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi ke kehidupan perkotaan serta memiliki sektor industri manufaktur yang lebih bervariasi dan sektor- sektor jasa

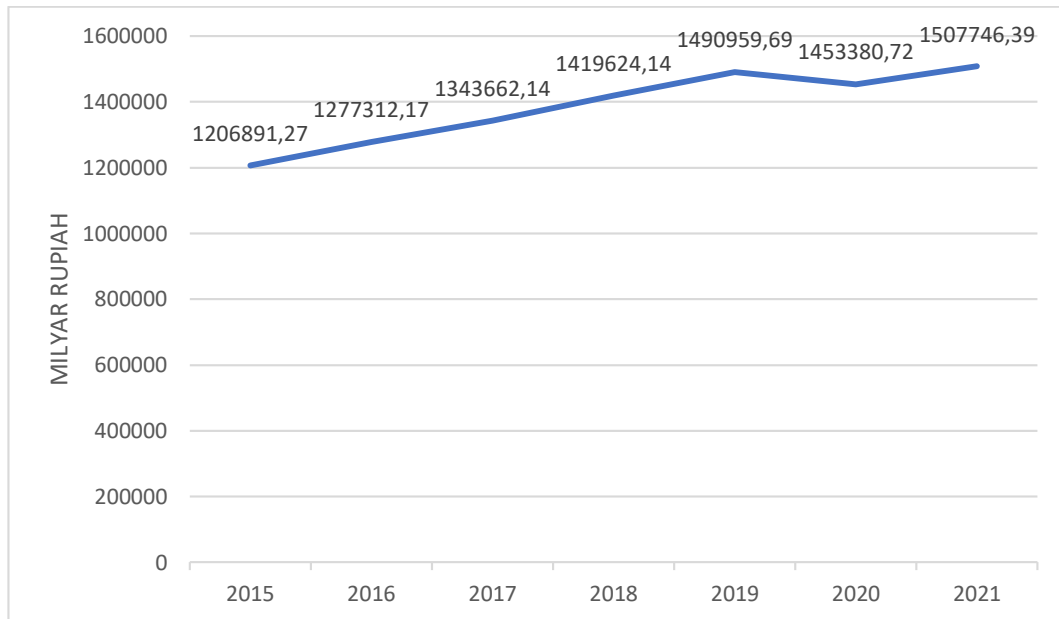
yang tangguh. Teori Lewis diakui sebagai teori umum yang membahas proses pembangunan di negara- negara dunia ketiga yang mengalami kelebihan penawaran tenaga kerja (Michael Todaro, 2004).

Perkembangan akan pembangunan ekonomi tersebut memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon Kuznets (dalam Jhinhan 2010 : 57 dalam Ravindra 2014) adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis-jenis barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Sedangkan menurut Tarigan (2005 : 46 dalam Ravindra 2014) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan dimana terjadi pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan di suatu wilayah tertentu, atau dapat dikatakan kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi.

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB akan memberi suatu gambaran bagaimana kemampuan daerah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada.

PDRB di Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan dan penurunan berfluktuatif yang berarti bahwa belum optimalnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup manusia serta pemerataan di seluruh wilayah Jawa Barat. Hal ini menarik untuk dikaji mengingat Jawa Barat memiliki kawasan industri terbesar di Indonesia dan kaya akan sumber daya dan masih dimungkinkan jika diolah dengan lebih baik dan maksimal. Bahkan letak geografis Provinsi Jawa

Barat berdekatan dengan ibu kota yang dinilai memiliki arti strategis terutama dalam bidang perekonomian.



Gambar 1.1 PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2021 (Milyar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah PDRB Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami tren kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Hanya saja pada tahun 2020, PDRB provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2019 PDRB Jawa Barat sebesar Rp.1490959,69 milyar menjadi Rp. 1453380,72 milyar pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 PDRB mulai kembali meningkat sebesar Rp.1507746,39 milyar. Yang mana angka PDRB pada tahun 2021 telah melewati angka PDRB pada tahun tahun sebelumnya.

Aktivitas perekonomian yang terjadi dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai fasilitas dan kemudahan. Apabila aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut

mengelompok karena dorongan berbagai faktor, maka akan membentuk apa yang dinamakan dengan aglomerasi ekonomi.

Markusen (dalam kuncoro, 2012) menyatakan bahwa aglomerasi merupakan suatu lokasi yang "tidak mudah berubah" akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang berdekatan letaknya dengan perusahaan lain serta penyedia jasa-jasa.

Pada dasarnya pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan masyarakat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai kondisi fisik saja. Adanya industrialisasi atau pembangunan industri suatu wilayah, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti akan mengubah tingkat hidup yang lebih maju dan bermutu. Pergeseran sektor dari sektor primer ke sektor non-primer merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri.

Industri cenderung beraglomerasi di daerah-daerah yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Aglomerasi dapat menghasilkan perbedaan spasial pada tingkat pendapatan. Menurut Sodik dan Iskandar (2007) menyatakan bahwa semakin teraglomerasi secara spasial suatu perekonomian maka akan semakin meningkat pula pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhan regional pendapatan riil akan selalu berbeda ketika aglomerasi terjadi dan aglomerasi memiliki dampak negatif terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan riil, di tingkat regional maupun agregat (Cerina & Mureddu, 2014). Daerah-daerah yang banyak memiliki industri lebih cepat berkembang karena lebih banyak memiliki akumulasi modal.

Tabel 1.1 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021			
Lapangan Usaha	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,78	9,22	8,54
Pertambangan dan Penggalian	1,25	1,11	1,16
Industri Pengolahan	41,6	41,11	41,8
Pengadaan Listrik dan Gas	0,52	0,48	0,51
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,1	0,11
Konstruksi	8,54	8,21	8,67
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Sepeda Motor	15,24	14,58	14,46
Transportasi dan Pergudangan	5,52	5,24	4,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,88	2,92	2,83
Informasi dan Komunikasi	2,87	3,92	3,95
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,71	2,8	2,93
Real Estate	1,08	1,13	1,19
Jasa Perusahaan	0,47	0,4	0,41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,31	2,21	2,06
Jasa Pendidikan	3,21	3,63	3,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,78	0,8
Jasa Lainnya	2,15	2,16	2,05
PDRB	100	100	100

Sumber: BPS Jawa Barat 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan yang besarnya tiap tahun lebih dari 40%. Pada tahun 2019 sektor industri pengolahan mencapai 41,6% dari total PDRB Jawa Barat. Kemudian pada tahun

2020 mengalami peningkatan menjadi 41,1% dan kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 41,8%.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan di Jawa Barat yang terus meningkat menyebabkan terjadinya perubahan struktural yang dapat dijelaskan dengan teori Hollis B Chenery. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian suatu wilayah antara lain adalah kelancaran transisi dari pola perekonomian industri, kesinambungan akumulasi modal fisik dan manusia, perubahan permintaan konsumen, perkembangan daerah perkotaan berkat migrasi para pencari kerja dan pertanian di pedesaan dan kota kecil. Selanjutnya transformasi struktural hanya akan berjalan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk dan menurunnya derajat dualisme ekonomi antara kota dan desa.

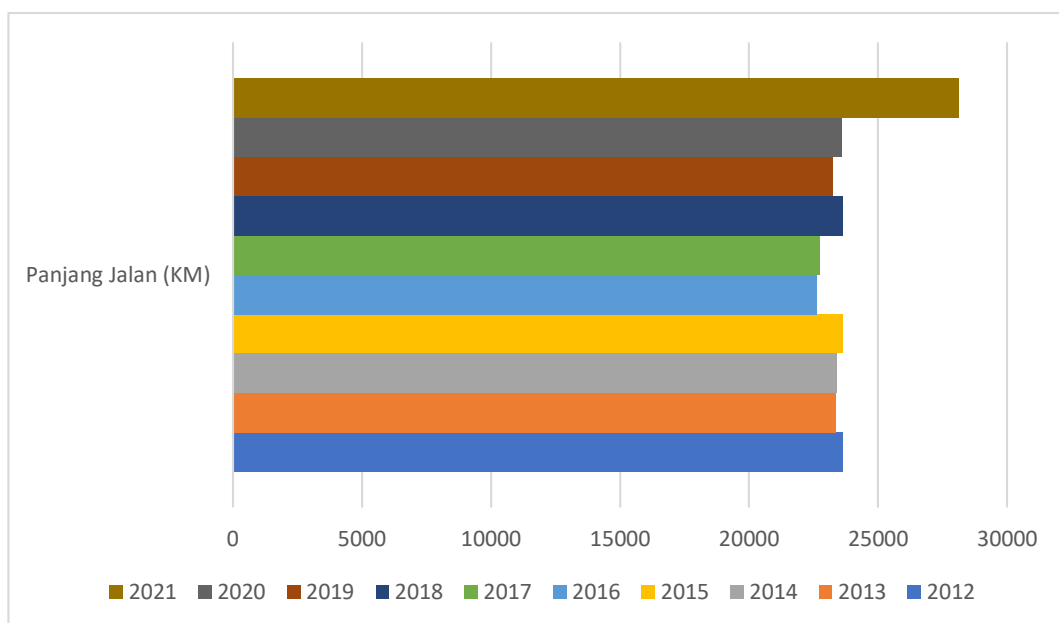
Selain aglomerasi industri, Infrastruktur jalan di Jawa Barat dibangun agar dapat diakses oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Infrastruktur merupakan sarana publik primer dalam menjalankan perekonomian suatu negara. Keberadaan infrastruktur sangatlah penting bagi suatu perekonomian untuk suatu daerah dimana keberadaan infrastruktur yang baik akan pengaruh positif terhadap masyarakat suatu daerah. Infrastruktur dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan kelancaran distribusi aliran barang. Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan terselenggara sistem transportasi yang efektif, efisien, aman dan lancar. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang paling sering digunakan adalah infrastruktur untuk suatu wilayah agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri dari daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

Meningkatnya jumlah penduduk akan merangsang naiknya permintaan barang dan jasa. Dimana menurut UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan di mana jalan berperan sebagai prasarana transportasi yang memiliki peran penting dalam ekonomi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagai prasarana distribusi barang dan merupakan kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan meningkat suatu wilayah. Infrastruktur transportasi terutama. Jalan merupakan salah satu indikator yang sangat penting bagi investor untuk menanamkan modal di suatu daerah.

Kondisi ruas jalan yang buruk akan menghambat lalu lintas perekonomian suatu daerah yang mana berimbas pada kelancaran akses perekonomian suatu masyarakat, yang mengakibatkan mobilitas antara daerah dan distribusi barang menjadi sulit. Karena masalah pembebasan lahan atau rintangan birokrasi lainnya. Pembangunan infrastruktur jalan dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat di Provinsi Jawa Barat. Infrastruktur pedesaan sebagai sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah, ataupun pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat

seperti jalan, jembatan, kendaraan, terminal, pelabuhan, bandar udara, perumahan, pasar, perbankan, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, air bersih, penerangan dan sanitasi yang dapat mendukung tercapainya kehidupan yang layak bagi masyarakat pedesaan baik material maupun spiritual. Kurangnya infrastruktur menyebabkan banyak masyarakat hidup terkurung di wilayah terpencil dengan tingkat kemiskinan yang sangat parah, oleh sebab itu membuka akses agar supaya mempermudah suatu daerah. Pada berbagai persoalan yang memiliki kehidupan masyarakat mulai dari kemiskinan, wabah penyakit menular, gizi buruk, buta huruf dan keterbelakangan. Obat mujarab yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit tersebut adalah dengan membangun infrastruktur dasar (Hermanto Dardak 2009). Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan dalam suatu wilayah untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional.



Gambar 1.2 Kondisi Infrastruktur Jalan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012-2021 (KM)

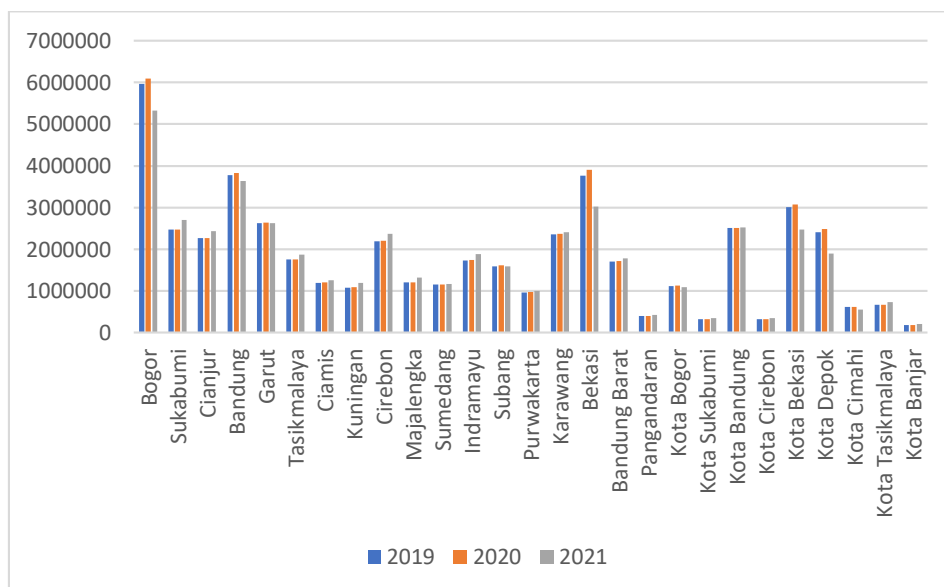
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Pembangunan infrastruktur sangatlah penting dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat suatu wilayah, prasarana infrastruktur tidak hanya dibuat oleh rumah tangga maupun industri sehingga peningkatan prasarana infrastruktur di Jawa Barat dapat membawa kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pandangan Neo-Klasik dengan teori yang dikembangkan Robert Solow, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi, dimana salah satunya adalah penduduk, karena penduduk memberikan kontribusi dalam penyediaan tenaga kerja, dari tenaga ahli sampai tenaga buruh. Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk sebagai penyedia tenaga kerja, tenaga ahli, yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Disamping pertambahan jumlah penduduk, mengakibatkan bertambah dan semakin kompleks kebutuhannya (Sadono Sukirno, 1985). Pertambahan penduduk dan hal hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi (Lincoln Arsyad, 1997).

Menurut Penelitian Indra Rukmana (2012), Penduduk merupakan salah satu faktor yang signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, dengan adanya penduduk yang padat, maka kegiatan ekonomi akan berlangsung dengan baik. Jika kebijakan terhadap penduduk sejalan dengan kebijakan lain didalam suatu wilayah.

Agus Widarjono (1999) mengatakan bahwa penduduk relatif berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional suatu daerah, tergantung bagaimana penduduk bekerja secara efisien atau tidak di daerah tersebut. Bila suatu daerah merupakan daerah yang belum mandiri, dan memperoleh subsidi dari pemerintah pusat, maka pengaruh penduduk yang semakin padat akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sebaliknya, jika daerah tersebut sudah mandiri, penduduk sangat penting di dalam daerah itu dan perlu diperhatikan pendidikan dari segi kualitas, kuantitas, dan lapangan kerjanya. Apakah penduduk bekerja efektif dan mampu menanggung penduduk yang kurang produktif, atau penduduk di daerah tersebut tingkat beban tanggungan tinggi, maka pertumbuhan ekonomi regional relatif tergantung kondisi penduduk suatu daerah.



Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 (Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

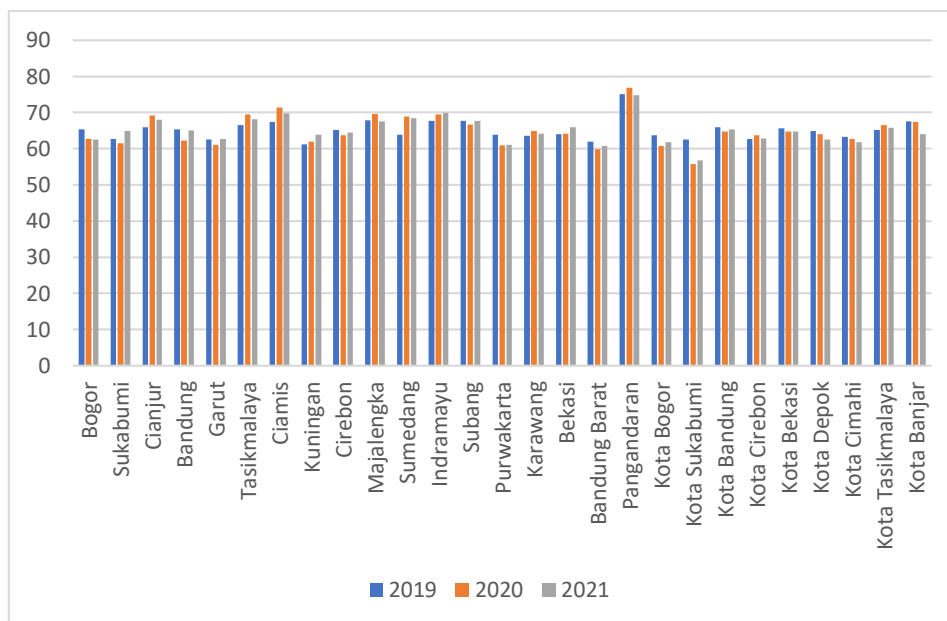
Berdasarkan gambar 1.3 di atas rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di Jawa Barat cenderung meningkat dari tahun 2019-2021. Terdapat beberapa

kabupaten/kota yang mengalami penurunan cukup signifikan di tahun 2021 yaitu di kabupaten Bogor, kabupaten Bandung, kabupaten Bekasi, kota Bekasi, kota Depok dan kota Cimahi. Penurunan jumlah penduduk di beberapa kota yang disebutkan disebabkan karena adanya dampak negatif dari pandemi covid-19. Meskipun begitu kabupaten/kota lainnya tetap mengalami peningkatan selama tahun 2019-2021.

Faktor lain yang mempengaruhi PDRB suatu wilayah adalah angkatan kerja yang bekerja atau dengan kata lain dapat kita sebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angkatan kerja yang bekerja ini akan terbentuk menjadi besar apabila suatu daerah mempunyai jumlah penduduk yang besar juga. Pertumbuhan penduduk yang besar memiliki kecenderungan membawa pertumbuhan ekonomi yang lambat apabila tidak dapat mengatasi masalah angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan pekerjaan.

Manusia merupakan faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu bangsa. Alokasi SDM yang efektif merupakan awal pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal baru mulai dibutuhkan untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh. Dapat dikatakan bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat yang sangat diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut (Dumairy, 1997) tenaga kerja adalah penduduk yang mempunyai umur didalam batas usia kerja. Menurut (Simanjuntak, 2005), tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok

yang sama. Semakin besar TPAK, semakin besar jumlah angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih bersekolah dan yang mengurus rumah tangga, semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja semakin kecil jumlah angkatan kerja, dan akibatnya semakin kecil TPAK (Simanjuntak, 2005).



Gambar 1.4 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Gambar di atas menunjukkan persentase tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten/kota Jawa Barat yang cenderung merata namun berfluktuasi pada tahun 2019-2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang paling tinggi yaitu kabupaten Pangandaran sebesar dengan angka lebih dari 70%. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang paling kecil terjadi di kota Sukabumi pada tahun 2020 dan 2021 yang berada di bawah 60%. Kabupaten/kota yang cenderung mengalami penurunan selama tahun 2019-2021 adalah kabupaten Bogor, kabupaten

Purwakarta, kabupaten Bandung Barat, kota Bekasi, kota Depok, kota Cimahi, dan kota Banjar.

Dari uraian latar belakang di atas dapat dikatakan bahwa pola pemusatan aglomerasi dapat terjadi karena adanya perbedaan spesialisasi antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Selain itu, keuntungan pola pemusatan atau aglomerasi diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap PDRB di suatu wilayah. Sementara itu dalam hubungannya dengan PDRB variabel aglomerasi industri, infrastruktur jalan, jumlah penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat dikatakan memberikan kontribusi dalam skala kapasitas yang berbeda-beda terhadap peningkatan PDRB wilayah khususnya di Jawa Barat. Dengan ditemukannya fenomena yang terjadi dari uraian di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisa kondisi tersebut, dengan mengambil judul **“PENGARUH AGLOMERASI INDUSTRI, INFRASTRUKTUR JALAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP PDRB KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Aglomerasi Industri, Infrastruktur Jalan, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara parsial terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021?

2. Bagaimana pengaruh Aglomerasi Industri, Infrastruktur Jalan, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara bersama-sama terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Aglomerasi Industri, Infrastruktur Jalan, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara parsial terhadap PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Aglomerasi Industri, Infrastruktur Jalan, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara bersama-sama terhadap PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi input dan dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengacu pada peningkatan PDRB khususnya di Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan serta pengetahuan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di 18 Kabupaten yang ada di Jawa Barat meliputi Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat dan Pangandaran. Beserta 9 Kota di Jawa Barat yang meliputi Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya, dan Banjar.

Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui *website* resmi dari Jabar Open Data dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2022/2023 dengan perkiraan pelaksanaan selama 6 bulan yaitu pada bulan Oktober 2022 sampai bulan April 2023.

